

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 Disetujui

Ini Saran-saran DPRD untuk Bupati Demak



VARIA LEGISLATIF

DEMAK (KR) - Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak 2022 resmi disetujui DPRD dan Bupati Demak untuk menjadi peraturan daerah, Kamis (27/7). Sejumlah saran pun disampaikan pihak legislatif, termasuk di dalamnya percepatan penyerapan anggaran. Karena tingkat penyerapan anggaran menjadi bagian pertimbangan Kementerian Keuangan dalam pemberian insentif fiskal daerah.

Seperti disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Demak HS Fahrudin Bisri Slamet pada Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, realisasi penyerapan anggaran daerah merupakan indikator kinerja aparat pemerintah daerah. Maka itu perlu adanya percepatan realisasi penyerapan anggaran dengan Silpa seminimal mungkin, bila perlu nihil. Sebagai wujud perencanaan anggaran yang cermat sesuai kebutuhan.

Sehubungan itu sejumlah saran pun disampaikan, dalam rangka mendorong percepatan penyerapan anggaran daerah tersebut. Seperti saran ditujukan kepada BPKPAD Kabupaten Demak, terkait perbaikan sistem pembayaran gaji agar temuan BPK terkait kelebihan pembayaran gaji ASN tidak terjadi lagi.

"Di samping itu melakukan pula integrasi sistem pembayaran gaji dengan sistem informasi kepegawaian pada BKPP. Serta berkoordinasi BKPP untuk mengkoordinasikan kepada pejabat pengelola data kepegawaian oleh masing-masing perangkat daerah, agar melakukan pengecekan data secara periodik.



KR - Sari jati
Ketua DPRD Kabupaten Demak HS Fahrudin Bisri Slamet didampingi para Pimpinan DPRD Kabupaten Demak saat menandatangani berita acara persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak 2022 oleh Bupati Demak.

Jika perlu menjadwalkan kegiatan rekonsiliasi data kepegawaian," ujarnya.
Selain itu, saran-saran terkait upaya

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga menyasar beberapa BUMD. Seperti saran ditujukan Perumda Air Minum, agar piutang

pelanggan sampai akhir Desember 2022 sebesar Rp 16,698 miliar langsung disetor ke pemerintah daerah.

"Lebih dari itu, saran yang tak kalah penting adalah untuk PT Demak Anwusa, yakni agar uang modal jangan hanya disimpan di deposito. Tapi benar-benar dikembangkan untuk usaha. Begitu pun PT Demak Sarana Sehat, kami sarankan agar melakukan perhitungan yang cermat saat perencanaan persediaan obat. Sehingga tidak ada lagi obat-obat yang dimusnahkan karena kedaluwarsa," tuturnya.

Sedangkan terkait selisih (defisit) terhadap Silpa APBD tahun anggaran 2022 yang digunakan untuk asumsi APBD tahun anggaran 2023 agar dapat diatasi oleh pemerintah daerah. Begitu pun temuan-temuan LHP BPK agar segera diselesaikan dan ditindaklanjuti.

Bupati Demak dr Hj Eisti'nah SE didampingi Wabup KH Ali Makhsum menyampaikan terimakasih atas saran dan masukan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak 2022. Sehubungan itu, bupati memastikan pihaknya segera menindaklanjuti. *sj

186 Ormas Terdaftar di Salatiga

SALATIGA (KR) - Jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Salatiga hingga pertengahan 2023 yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebanyak 186 ormas. "Jumlah ormas di Salatiga yang terdaftar sebanyak 186," kata Kepala Bakesbangpol Salatiga, Valentino Tanto Haribowo saat Audiensi Ormas dengan Pj Walikota Salatiga, Selasa (25/7). Ia mengungkapkan audiensi ini dilakukan dalam rangka menjaga hubungan agar tetap harmonis antar sesama organisasi di Salatiga.

Selain itu juga untuk menjaga situasi agar tetap kondusif menjelang pemilu tahun 2024 dan menumbuhkan semangat toleransi di Salatiga sehingga gelar kota tertoleran tetap di Salatiga. "Dari 186 organisasi yang terdaftar di Kota Salatiga, bahwasannya 70 peserta audiensi dengan keterwakilan masing-masing organisasi, dengan demikian hadir 35 organisasi. Ke depan kami akan undang dalam acara yang sama bagi organisasi yang belum kita undang," kata Valentino T Haribowo.

Sedangkan Penjabat (Pj) Walikota Salatiga, Sinoeng N Rachmadi pada kesempatan ini menyinggung soal dilaksanakannya sidang paripurna di Lapangan Pancasila oleh DPRD.

Rapat paripurna di luar gedung sesuatu banget karena baru pertama kali dilaksanakan di luar gedung dewan, dan karena ini saya ditanya rekan-rekan luar daerah dan provinsi. Antusiasme dalam perayaan Hari Jadi menjadi simbol kebersamaan," kata Sinoeng. Terkait dengan kondusifitas pada Pemilu 2024 akan menjadi barometer kondusifitas wilayah lain. Salatiga dijaga dengan baik agar kerukunan dan kedamaian tetap terjaga.

Ketua DPRD Salatiga, Dance Ishak Palit pada pertemuan dengan ormas di Salatiga ini mengusulkan mengusulkan dibentuk Peraturan Daerah (Perda) Organisasi Kemasyarakatan. "Perda tersebut nantinya akan mengakomodir dan memfasilitasi adanya ormas lokal. Sebab selama ini yang mendapatkan fasilitas adalah ormas vertikal," kata Dance Ishak Palit. Kajari Salatiga, Herwin Ardiono mengungkapkan dirinya sudah dua kali mengikuti kegiatan Ulang Tahun Hari Jadi Salatiga. "Saya tidak bisa menemukan sesuatu yang terjadi di Salatiga. Saya selalu sampaikan ke daerah asal saya di Purwokerto untuk mencontoh toleransi. (Sus)-f

Tidak Ada Ormas Radikal dan Intoleran

SALATIGA (KR) - Ketua DPRD Salatiga, Jateng Dance Ishak Palit menegaskan diperlukan segera dibentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang organisasi kemasyarakatan (ormas). Perda ini ke depan bakal mengatur fasilitas bagi ormas lokal Salatiga. Sebab selama ini fasilitas terjadi hanya kepada ormas vertikal saja sehingga kurang optimal dalam masyarakat.

"Perda tersebut nantinya akan mengakomodir dan memfasilitasi adanya ormas lokal. Sebab selama ini yang mendapatkan fasilitas adalah ormas vertikal," kata Dance Ishak Palit, saat audiensi dengan Ormas di Salatiga, Selasa (25/7).

Muttaqin dari Pemuda Muhammadiyah Salatiga mengusulkan agar ada pendidikan menyikapi berita hoax. Menurutnya memang sulit membedakan berita hoax tersebut dan terkadang berita hoax itu lebih menarik. Sedangkan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) KH Nur Rofiq memberikan dan menjamin (garansi) bahwa di Salatiga Jateng tidak ada ormas yang radikal dan intoleran. "Saya sudah berkoordinasi dengan pemuka agama agar menolak jika ingin masuk ke Kota Salatiga termasuk kepada Kesbangpol. Salatiga tidak ada ormas radikal," kata Nur Rofiq.

Kepala Bakesbangpol Salatiga, Valentino Tanto Haribowo mengungkapkan jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Salatiga hingga pertengahan 2023 yang terdaftar sebanyak 186 ormas. "Jumlah ormas di Salatiga yang terdaftar sebanyak 186," kata Kepala Bakesbangpol Salatiga, Valentino Tanto Haribowo saat Audiensi Ormas dengan Pj Walikota Salatiga, Selasa (25/7). Ia mengungkapkan audiensi ini dilakukan dalam rangka menjaga hubungan agar tetap harmonis antar sesama organisasi di Salatiga.

Selain itu juga untuk menjaga situasi agar tetap kondusif menjelang pemilu tahun 2024 dan menumbuhkan semangat toleransi di Salatiga sehingga gelar kota tertoleran tetap di Salatiga.

"Dari 186 organisasi yang terdaftar di Kota Salatiga, bahwasannya 70 peserta audiensi dengan keterwakilan masing-masing organisasi, dengan demikian hadir 35 organisasi. Ke depan kami akan undang dalam acara yang sama bagi organisasi yang belum kita undang," kata Valentino T Haribowo. (Sus)-f

Guru Tidak Tetap Diangkat Jadi Tenaga PPPK

SEMARANG (KR) - Sebanyak 13.302 guru tidak tetap (GTT) SMA/SMK/SLB baik negeri maupun swasta, berhasil diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah itu merupakan perekrutan tahun 2021 tahap 1 dan tahap 2, serta tahun 2023.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Uswatun Hasanah kepada wartawan di Semarang Rabu (26/7). Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.812 merupakan GTT sekolah negeri. Sedang total GTT SMA/SMK/SLB negeri pada tahun 2020 sebanyak 12.777 orang.

Uswatun Hasanah mengatakan untuk SMA negeri sederajat, pada

pengangkatan PPPK tahun 2021 tahap 1 ada 5.116 guru, PPPK tahap 2 ada 744 orang, dan PPPK pada tahun 2023 ada 2.952 guru. Dengan demikian total GTT sekolah negeri yang masuk dalam PPPK ada 8.812 orang.

"Saat ini guru honorer SMA sederajat negeri yang tersisa tinggal 3.965 guru. Diperkirakan jumlah guru yang tersisa kemungkin-

an bisa tersaring menjadi tenaga PPPK namun secara bertahap. Bisa tahun depan, tahun depannya lagi hingga tahun depannya lagi. Mudah-mudahan tidak terlalu lama waktunya nanti bisa terangkat semua GTT kita," ujarnya.

Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Nasikin menambahkan, untuk pegawai tidak tetap (PTT) SMA/SMK/SLB negeri total sebanyak 8.531 orang. Dengan jumlah PTT yang masuk menjadi PPPK tahun 2021 tahap 1 sebanyak 117 orang. Dan, PPPK di tahap 2 sebanyak 18 orang. Total sisa PTT saat ini 8.396 orang.

Menurut Nasikin, tingginya kebutuhan guru di Jawa Tengah menjadi hal yang melatarbelakangi pemerintah gencar melakukan seleksi PPPK, mengingat pendidikan merupakan hal yang penting untuk menciptakan generasi emas.

"Guru kita yang PNS belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 640 sekolah negeri, baik itu SMA, SMK, maupun SLB. Untuk memenuhi kebutuhan guru tersebut tahun 2020 banyak menggunakan dari GTT. Karena enggak ada pengangkatan PNS untuk guru, maka GTT yang mensupport pendidikan," ujarnya. (Bdi)-f

Jurnal Hukum Unissula Terindeks Scopus

SEMARANG (KR) - Selain pengembangan bidang pendidikan dimana semua prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung atau FH Unissula Semarang (S1 Ilmu Hukum, S2 Magister Ilmu Hukum, S2 Kenotariatan dan S3 Ilmu Hukum), FH Unissula juga melakukan peningkatan kualitas penelitian dan jurnal.

"Saat ini FH Unissula memiliki 1 jurnal interna-

sional (terindeks Scopus) yaitu Jurnal Hukum dan 6 lainnya terindeks nasional (Sinta 2 ada tiga buah jurnal, Sinta 3, Sinta 4 dan Sinta 5 masing masing 1 jurnal). Bahkan saat ini 3 jurnal kami yang Sinta 2 yaitu Jurnal Pembaharuan Hukum, Internasional Journal of Law Reconstruction, dan Jurnal Akta, ketiganya sedang kami ajukan untuk jurnal internasional (terindeks Sco-

pus)," ujar Dekan FH Unissula Dr Dr Bambang Tribawono SH MH didampingi Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Prof Dr Anis Masdhurohatun SH MH, Pengelola Jurnal Hukum Unissula Dr Andri Winjaya Laksana SH MH, Rabu (25/7).

Menurut Dekan, capaian Jurnal Hukum terindeks Scopus merupakan prestasi membanggakan karena di Indonesia sejauh ini baru ada sekitar 5 FH yang memiliki jurnal terindeks Scopus yaitu FH Unhas, FH Unsi, FH UNS, FH Undip dan FH Unissula. "Keuntungan jurnal bisa terindeks Scopus di antaranya pengakuan internasional, memberi ruang dosen meningkatkan karir sampai guru serta meningkatkan literasi wacana mahasiswa tentang perkembangan peradaban hukum di Indonesia," tambah Dekan. (Sgi)-f



KR-Sugeng Irianto
Dekan (tengah) saat menyampaikan tentang jurnal internasional FH Unissula.

Sekolah Tidak Boleh Tahan Ijazah Siswa

TEGAL (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan, sekolah negeri di Jawa Tengah dilarang keras menahan ijazah siswanya yang telah lulus dengan alasan apa pun. Mulai sekarang tidak akan ada lagi kejadian sekolah menahan ijazah lulusan atas dasar tunggakan pembayaran atau apapun alasannya. Tidak ada istilah tunggakan pembayaran di sekolah negeri.

Ganjar Pranowo menegaskan hal ini saat menghadiri Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IpeKB) Jateng di GOR Tri Sanja, Slawi, Kabupaten Tegal, Rabu (26/7). Menurut Ganjar masih ada beberapa yang biasanya punya problem dengan menahan ijazah. Untuk itu Ganjar minta agar lapor apakah sekolah negeri maupun swasta, dan segera akan diurus.

Ganjar mengatakan, sekolah negeri dipastikan tidak ada yang melakukan penahanan ijazah lulusan. Jika masih ditemukan, Ganjar memastikan akan diurus dan beres tidak lebih dari dua hari. "Kalau sekolah negeri saya pastikan beres besok pagi," lanjutnya.

Politikus berambut putih itu juga mengatakan tidak ada istilah tunggakan pembayaran pada sekolah yang dikelola pemerintah. Bukan hanya di sekolah negeri, Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga akan melakukan negosiasi jika penahanan ijazah dilakukan pihak sekolah swasta.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga berkomitmen menutup kesempatan perilaku pungutan liar (pungli) di sekolah. Keseriusan Ganjar tersebut dibuktikan dengan ketegasannya dalam mengambil sikap saat menemukan sekolah yang melakukan pungli. (Bdi/Ryd)-f

Bantuan Hand Traktor Tingkatkan Pertanian

MAGELANG (KR) - Sebanyak 4 hand traktor bantuan dari BRI Peduli diserahkan Pemimpin Cabang Bank BRI Muntilan Dani Ratmoko di halaman Kantor Desa Wates Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, Kamis (27/7). Diharapkan hal ini dapat membantu peningkatan pertanian agar lebih maju lagi.

"Dengan adanya bantuan ini dapat lebih mempercepat di bidang pertanian, dan masyarakat dapat lebih sejahtera lagi," kata Dani Ratmoko kepada KR di halaman Kantor Desa Wates, yang berjarak sekitar 10 Km dari puncak Gunung Merapi wilayah Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Diharapkan keempat traktor tersebut dapat dijaga dan bermanfaat hingga dapat berkelanjutan. Diharapkan masyarakat juga terbantu dengan adanya program ini.

Kepala Desa Wates Surtarno secara terpisah diantaranya mengatakan pihaknya sangat senang menerima bantuan tersebut. "Dengan senang hati kami mewakili masyarakat Desa Wates, sangat terbantu, dan mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk petani kami," tambahnya.

Sesuai dengan program pemerintah usai pandemi Covid-19, lanjutnya, upaya peningkatan ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Dengan ditambahnya bantuan ini diharapkan dapat segera terwujud masyarakat Desa Wates, khususnya, bisa terangkat bidang perekonomiannya dan ketahanan pangannya bisa mencukupi. Dikatakan, mayoritas masyarakat yang berada di wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB) 3 Gunung Merapi ini merupakan petani, yaitu sekitar 90 per-

sen. Hal tersebut juga dibenarkan Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur Tri Brata secara terpisah kepada KR membenarkan mayoritas masyarakat Desa Wates adalah petani. Dikatakan juga, keber-

adaan hand traktor ini memang sangat dibutuhkan masyarakat. Potensi sebenarnya lebih didominasi pada sayuran, namun untuk proses pengolahan tanahnya tetap menggunakan hand traktor dan juga dicangkul,

khususnya untuk pembuatan bedengan. Ketika sudah beberapa kali menanam cabe, biasanya terus menanam padi. Untuk menanam padi ini juga tetap menggunakan fasilitas hand traktor. (Tha)-f



KR-Toha
Pemimpin Cabang Bank BRI Muntilan, Camat Dukun, Kades Wates Kecamatan Dukun berada di dekat bantuan keempat hand traktor.